

ANALISIS KESIAPAN GOVERNMENT RESOURCE PLANNING (GRP) DALAM Mendukung IMPLEMENTASI AKUNTANSI BERBASIS AKRUAL DI KEMENTERIAN KEUANGAN TIMOR-LESTE

Emiliana de Deus Soares^{1*)}, Eliza Fatima²⁾

^{1,2}Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Indonesia

*Email Korespondensi: dedeusemiliana@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini menganalisis kesiapan sistem Government Resource Planning (GRP) dalam mendukung implementasi akuntansi berbasis akrual di Kementerian Keuangan Timor-Leste melalui pendekatan studi kasus dengan kerangka *Technology–Organization–Environment* (TOE). Isu utama yang diangkat adalah terbatasnya pemanfaatan fitur akrual pada GRP FreeBalance, rendahnya kapasitas SDM, serta lemahnya dukungan regulasi dan integrasi sistem (S. Reformasi, 2022). Tujuan penelitian ini adalah mengevaluasi kesiapan teknologi, organisasi, dan lingkungan eksternal dalam mendukung transisi menuju akuntansi akrual. Metodologi yang digunakan adalah kualitatif-deskriptif dengan teknik wawancara semi-terstruktur dan analisis dokumen resmi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara teknis GRP memiliki kemampuan yang memadai, namun belum dimanfaatkan secara optimal. Hambatan terbesar terletak pada aspek organisasi, yaitu rendahnya kompetensi aparatur dan belum tersedianya SOP teknis yang seragam. Faktor lingkungan juga belum sepenuhnya mendukung, karena regulasi akuntansi akrual masih dalam tahap pengembangan dan belum ada tekanan kebijakan yang kuat. Temuan ini menegaskan bahwa keberhasilan implementasi akrual tidak hanya bergantung pada kesiapan teknologi, tetapi juga memerlukan penguatan kapasitas kelembagaan dan lingkungan regulasi yang mendukung.

Kata kunci: Government Resource Planning, akuntansi akrual, TOE framework, kesiapan teknologi, reformasi keuangan

Abstract

This study analyzes the readiness of the Government Resource Planning (GRP) system to support the implementation of accrual-based accounting in the Ministry of Finance of Timor-Leste, using a case study approach grounded in the *Technology–Organization–Environment* (TOE) framework. The core issues addressed include the limited utilization of GRP's accrual features, insufficient human resource capacity, and the lack of supportive regulatory and system integration environments. The objective of this research is to evaluate the technological readiness, organizational capacity, and environmental factors influencing the transition to accrual accounting. A qualitative-descriptive method was applied through semi-structured interviews and document analysis. The findings reveal that while GRP is technically capable of supporting accrual accounting through available modules such as asset management, general ledger, and integration features its operational use remains suboptimal. The main obstacle lies within the organization, particularly in the limited understanding of accrual accounting concepts and the absence of standardized technical procedures. Additionally, the regulatory environment is still in the preparatory phase, lacking formal national standards and enforcement mechanisms. Overall, the study concludes that the readiness level of GRP is moderate, highlighting the critical need for institutional capacity building and stronger regulatory support to ensure successful accrual implementation.

Keywords: Government Resource Planning, accrual accounting, TOE framework, system readiness, public financial reform

PENDAHULUAN

Reformasi pengelolaan keuangan publik (Public Financial Management/PFM) merupakan agenda strategis yang diadopsi oleh banyak negara berkembang untuk memperkuat tata kelola fiskal, meningkatkan transparansi, dan mendorong akuntabilitas sektor publik (P. Reformasi & Oecd, n.d.). Pemerintah Timor-Leste telah mengangkat peningkatan kualitas pelaporan sebagai pilar utama dalam reformasi fiskal nasional (Ministry of Finance of Timor Leste, 2022). Dalam *PFM Reform Strategy*, pemerintah menekankan pentingnya modernisasi sistem informasi keuangan dan transisi ke pelaporan berbasis akrual sesuai dengan standar International Public Sector Accounting Standards (IPSAS). (Ministry of Finance, Timor-Leste, 2022). Namun, implementasi reformasi tersebut masih menghadapi berbagai tantangan. salah satunya adalah lemahnya integrasi sistem, terutama dalam pemanfaatan modul akrual pada Government Resource Planning (GRP) yang belum optimal. Selain itu, terbatasnya kapasitas sumber daya manusia, dan keterbatasan integrasi dengan sistem lain seperti SIGTAS dan ASYCUDA menyebabkan rekonsiliasi manual yang masih dilakukan di berbagai unit kerja (S. Reformasi, 2022). Laporan audit nasional menunjukkan bahwa kualitas laporan keuangan pemerintah masih dipengaruhi oleh informasi yang tidak andal, keterlambatan pelaporan, serta ketidakpatuhan terhadap standar akuntansi sektor publik. Hal ini mengindikasikan bahwa kesiapan teknologi, proses, dan kompetensi aparatur belum sepenuhnya mendukung implementasi akuntansi berbasis akrual. (Banding, 2023).

Sebagai sistem *Integrated Financial Management Information System (IFMIS)* utama, GRP FreeBalance merupakan perangkat lunak Commercial-Off-The-Shelf (COTS) yang dirancang untuk mendukung berbagai basis akuntansi, mulai dari kas hingga akrual. Namun dalam praktiknya, penggunaan modul pencatatan beban, aset, dan kewajiban masih terbatas, serta integrasi dengan sistem lain masih menghadapi kendala teknis.

Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa kualitas pelaporan keuangan di Timor-Leste dipengaruhi oleh tiga faktor utama: pemahaman staf terhadap IPSAS, pemanfaatan teknologi informasi, dan efektivitas pengendalian internal (Dias & Ec, 2024). Selain itu, studi mengenai kesiapan organisasi dalam implementasi sistem informasi berbasis akrual mengungkapkan bahwa faktor teknologi, organisasi, dan lingkungan menjadi determinan utama keberhasilan reformasi (Sektor et al., 2025).

Meskipun telah ada penelitian tentang IPSAS, tata kelola, dan pelaporan keuangan, belum ada studi yang khusus mengevaluasi kesiapan GRP FreeBalance dalam mendukung transisi akrual. Hal ini menimbulkan *research gap* yang signifikan, yaitu perlunya menganalisis kesiapan GRP melalui kerangka Technology–Organization–Environment (TOE) untuk memahami faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan transisi akrual di Timor-Leste (Sektor et al., 2025). Penelitian ini bertujuan untuk: (1) mengevaluasi kesiapan teknologi GRP dalam mendukung pencatatan dan pelaporan akrual; (2) menilai kesiapan organisasi yang mencakup kapasitas SDM, SOP, dan koordinasi antar unit; dan (3) menganalisis faktor lingkungan seperti regulasi, standar, dan tuntutan audit yang memengaruhi implementasi akrual. Hasil penelitian diharapkan memberikan kontribusi bagi penguatan reformasi akuntansi berbasis akrual dan optimalisasi pemanfaatan GRP FreeBalance di sektor publik Timor-Leste. (Ministry of Finance of Timor Leste, 2022).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif-deskriptif dengan desain studi kasus, karena fokus penelitian adalah memahami secara mendalam kesiapan Government Resource Planning (GRP) dalam mendukung implementasi akuntansi berbasis akrual. Pemilihan desain studi kasus didasarkan pada rekomendasi Yin (2023), yang menyatakan bahwa studi kasus sesuai untuk menjawab pertanyaan “bagaimana” dan “mengapa” terhadap fenomena yang kompleks dan kontekstual, serta memberi ruang bagi peneliti untuk menghasilkan “pencerahan empiris” terhadap konsep teoritis, dalam hal ini kerangka Technology–Organization–Environment (TOE). Ruang lingkup penelitian difokuskan pada sistem GRP FreeBalance sebagai platform IFMIS utama pemerintah, khususnya modul-modul yang relevan dengan akuntansi akrual seperti general ledger, accounts payable, asset management, commitment control, dan pelaporan. Penelitian ini juga mencakup tiga unit utama di Kementerian Keuangan Timor-Leste, yaitu Unit GRP/IFMIS, Direktorat Jenderal Treasury, dan Direktorat Akuntansi dan Pelaporan, sehingga objek penelitian mencerminkan kesiapan teknologi, organisasi, dan lingkungan sesuai definisi TOE (Az-Zahra & Khudri, 2024).

Bahan utama penelitian meliputi dokumen resmi pemerintah seperti Laporan Audit Tribunal de Contas 2023 yang menyoroti kelemahan integritas data, PFM Reform Strategy 2022–2027 yang menjadi landasan kebijakan transisi akrual, serta ADB Financial Management Assessment 2024 yang mencatat kelemahan struktural PFM. Selain itu, penelitian juga menggunakan jurnal ilmiah relevan seperti Dias (2024) terkait kualitas laporan keuangan dan IPSAS, Fonseca (2025) terkait tata kelola keuangan dan IFMIS, serta Az-Zahra (2024) terkait penerapan kerangka TOE. Perangkat analisis terdiri dari pedoman wawancara.

Penelitian dilakukan di Kementerian Keuangan Timor-Leste, khususnya pada Treasury, Direktorat Akuntansi, dan Unit GRP/IFMIS sebagai pengguna dan pengelola utama sistem GRP. Pengumpulan dokumen dilakukan melalui portal resmi MoF, IFMIS Unit, dan laporan publik Tribunal de Contas. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui dua metode utama, yaitu wawancara semi-terstruktur dan analisis dokumen. Wawancara dilakukan terhadap manajer GRP, operator modul akrual, serta staf akuntansi dan pelaporan, mengikuti pedoman Yin (2023) yang menekankan penggunaan pertanyaan “bagaimana” dan “mengapa” untuk memperdalam konteks studi kasus. Analisis dokumen dilakukan terhadap TC Audit Report 2023, PFM Reform Strategy, Manual GRP FreeBalance, serta laporan PEFA sebagai sumber triangulasi untuk memperkuat validitas temuan.

Definisi operasional variabel penelitian mengacu pada tiga dimensi TOE Framework (Az-Zahra & Khudri, 2024). Kesiapan teknologi diukur melalui kompatibilitas modul GRP dengan IPSAS akrual, kemampuan sistem dalam mencatat beban, depresiasi, aset tetap, serta integrasi eksternal dengan SIGTAS dan ASYCUDA. Kesiapan organisasi mencakup kompetensi sumber daya manusia, ketersediaan SOP akuntansi, koordinasi antar-unit, serta komitmen pimpinan. Faktor lingkungan mencakup regulasi pemerintah, tuntutan audit, serta tekanan reformasi PFM.

Teknik analisis data menggunakan analisis tematik mengikuti Yin (2023), yang meliputi proses reduksi data melalui pengelompokan berdasarkan tema TOE, penyajian data dalam bentuk matriks hubungan antar tema, dan penarikan kesimpulan melalui triangulasi antara data wawancara dan dokumen resmi. Triangulasi dilakukan sesuai anjuran Yin (2018) untuk meningkatkan credibility dan confirmability hasil penelitian. Dengan keseluruhan

metode ini, penelitian memberikan pemahaman komprehensif tentang kesiapan GRP dalam mendukung transisi akuntansi berbasis akrual di Timor-Leste.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

1. Kesiapan Teknologi Sistem GRP

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada dimensi teknologi, Sistem Government Resource Planning (GRP) telah menyediakan berbagai modul inti yang esensial seperti penganggaran, pengeluaran, pembayaran, general ledger, manajemen aset, dan pelaporan. Informan I menjelaskan bahwa GRP telah dirancang untuk mendukung pencatatan berbasis kas hingga akrual penuh. Informan II menambahkan bahwa fitur teknis seperti chart of accounts (COA) multi-segmen, subledger AP/AR, jurnal akrual otomatis, mekanisme lock period, dan proses tutup buku sudah memadai untuk menopang pelaporan akrual, meskipun pemanfaatannya masih terbatas. Saat ini GRP telah terhubung dengan Bank Sentral untuk transaksi real-time dan sedang dalam proses integrasi dengan ASYCUDA dan SIGTAS. Namun, menurut informan III, integrasi lintas sistem belum merata, terutama pada manajemen aset, payroll, dan e-procurement sehingga rekonsiliasi masih dilakukan secara manual. Selain itu, modul aset tetap belum berjalan secara end-to-end, khususnya pada depresiasi massal dan rekonsiliasi aset. Temuan ini sejalan dengan PFM Reform Strategy 2022–2027 yang menyebutkan bahwa integrasi aset dan pelaporan akrual masih menjadi kelemahan dalam sistem PFM nasional

2. Kesiapan Organisasi

Pada dimensi organisasi, seluruh informan menegaskan bahwa kapasitas sumber daya manusia dalam memahami akuntansi berbasis akrual masih rendah. Banyak staf pengguna GRP tidak memiliki latar belakang akuntansi sehingga mengalami kesulitan dalam mengenali pendapatan dan beban non-kas, pencatatan aset dan kewajiban jangka panjang, serta prinsip-prinsip IPSAS. Informan juga menyampaikan bahwa pelatihan akrual belum dilakukan secara rutin dan belum mencakup praktik penggunaan langsung modul akrual dalam GRP. Di samping itu, meskipun SOP akrual nasional telah tersedia, panduan teknis khusus penggunaan fitur akrual dalam GRP belum disusun, sehingga terjadi perbedaan penerapan antar lembaga pemerintah. Temuan ini juga diperkuat oleh laporan Audit (Banding, 2023), yang menemukan adanya inkonsistensi pengendalian internal dan variasi prosedur dalam proses pencatatan keuangan.

3. Kesiapan Lingkungan

Pada dimensi lingkungan, regulasi dan kebijakan akuntansi pemerintah masih berada pada tahap pengembangan. Informan dari bidang akuntansi menjelaskan bahwa standar akuntansi nasional belum sepenuhnya ditetapkan dan proses harmonisasi dengan IPSAS masih berlangsung, termasuk pembentukan Dewan Akuntansi Nasional. PFM Reform Strategy melaporkan bahwa implementasi akrual baru berada pada tahap persiapan. Selain itu, hasil audit Tribunal de Contas mengungkapkan kelemahan integritas data, rekonsiliasi manual, dan ketidaksesuaian pencatatan. PEFA juga menyoroti bahwa integrasi IFMIS/GRP masih lemah, terutama pada manajemen aset. Lingkungan eksternal turut dipengaruhi oleh dukungan donor seperti Indonesia AID, PKN STAN, dan Bank Dunia yang memberikan pelatihan dalam bidang akuntansi akrual dan penguatan kapasitas IFMIS.

Pembahasan Penelitian

Temuan penelitian menunjukkan bahwa pada dimensi teknologi, GRP berada pada kondisi “siap secara fungsional tetapi belum siap secara operasional”. Berdasarkan kerangka TOE, kesiapan teknologi tidak hanya diukur dari ketersediaan fitur, tetapi juga dari tingkat pemanfaatannya. Pada kasus GRP, fitur akrual seperti jurnal otomatis, modul aset, serta subledger AP/AR sudah tersedia, tetapi belum digunakan secara optimal. Integrasi sistem yang belum matang dan masih adanya proses manual menunjukkan bahwa kemampuan teknis sistem belum sepenuhnya diterjemahkan ke dalam kesiapan operasional. Kondisi ini sejalan dengan temuan Tribunal de Contas (2023) yang menyoroti kelemahan pada rekonsiliasi aset dan kualitas data transaksi.

Dari sisi organisasi, keterbatasan kompetensi SDM menjadi penghambat utama dalam implementasi akrual. Rendahnya pemahaman terhadap konsep akrual dan IPSAS, serta kurangnya pelatihan yang berkelanjutan dan berbasis praktik, menunjukkan bahwa organisasi belum memiliki kapasitas yang memadai untuk mendukung pemanfaatan fitur akrual dalam GRP. Hal ini sejalan dengan penelitian (Dias & Ec, 2024), dan (Fonseca et al., 2025), yang menekankan bahwa keberhasilan akuntansi akrual sangat bergantung pada kompetensi teknis, pelatihan berkelanjutan, dan kesiapan proses bisnis internal. Dalam kerangka TOE, aspek organisasi yang mencakup sumber daya manusia, proses, dan struktur masih berada pada tingkat kesiapan rendah sehingga mengurangi efektivitas penggunaan GRP.

Pada dimensi lingkungan, hasil penelitian menunjukkan bahwa belum matangnya regulasi dan minimnya tekanan kebijakan menghambat pemanfaatan fitur akrual dalam GRP. Standar akuntansi nasional yang belum final, lemahnya integrasi sistem, serta temuan audit mengenai ketidaksesuaian pencatatan dan rendahnya integritas data memperlihatkan bahwa lingkungan eksternal belum memberikan dukungan yang memadai. PFM Reform Strategy juga menegaskan bahwa transisi akrual masih dalam tahap desain awal. Dengan demikian, faktor lingkungan seperti regulasi, pengawasan, dan dukungan institusional belum mampu mendorong konsistensi implementasi akrual di seluruh lembaga pemerintah.

Tabel 1. Temuan Penelitian Berdasarkan Kerangka TOE

Dimensi TOE	Temuan Hasil Penelitian (Data Lapangan)	Pembahasan Interpretasi (Teori & Analisis)	Implikasi terhadap Kesiapan Akrual
Teknologi	GRP memiliki modul inti lengkap (GL, AP/AR, aset, pelaporan). Integrasi dengan Bank Sentral sudah berjalan; integrasi ASYCUDA & SIGTAS masih dalam proses. Modul aset belum end-to-end; rekonsiliasi aset masih manual.	Fitur tersedia namun belum dimanfaatkan optimal. Integrasi belum stabil kesiapan operasional rendah. Selaras dengan TC (2023) yang menemukan lemahnya rekonsiliasi dan kualitas data.	GRP secara teknis siap sebagian. Belum mendukung penuh pencatatan akrual secara otomatis dan lintas entitas.

Dimensi TOE	Temuan Hasil Penelitian (Data Lapangan)	Pembahasan Interpretasi (Teori & Analisis)	Implikasi terhadap Kesiapan Akrua
Organisasi	SDM tidak berlatar belakang akuntansi. Pemahaman akrual & IPSAS rendah. Pelatihan akrual belum rutin dan belum berbasis praktik modul GRP. SOP teknis GRP belum ada → implementasi antar lembaga tidak seragam.	SDM menjadi penghambat utama implementasi akrual. Pelatihan dan SOP adalah fondasi dalam kesiapan organisasi. Selaras dengan Dias (2024) & Fonseca (2025).	Kesiapan organisasi rendah. Pemanfaatan fitur akrual di GRP tetap minimal meskipun teknologinya tersedia.
Lingkungan	Standar akuntansi nasional belum final. Harmonisasi IPSAS masih berlangsung. TC menemukan integritas data rendah & rekonsiliasi manual. PEFA: integrasi IFMIS/GRP belum optimal. Ada dukungan donor (World Bank, STAN, Indonesia AID).	Regulasi belum memberikan tekanan kebijakan cukup kuat. Pengawasan eksternal menemukan kelemahan signifikan. PFM Reform Strategy: transisi akrual masih tahap desain.	Lingkungan eksternal belum mendukung percepatan implementasi akrual. Kesiapan institusional masih rendah.

KESIMPULAN

Penelitian ini menganalisis kesiapan Sistem Government Resource Planning (GRP) dalam mendukung implementasi akuntansi berbasis akrual di Kementerian Keuangan Timor-Leste melalui tiga dimensi TOE: teknologi, organisasi, dan lingkungan. Berdasarkan hasil wawancara, analisis dokumen, serta triangulasi temuan, dapat disimpulkan bahwa GRP secara teknis memiliki kemampuan yang memadai, tetapi belum sepenuhnya siap secara operasional untuk mendukung penerapan akuntansi berbasis akrual. Pada dimensi teknologi, GRP telah menyediakan fitur dan modul akrual yang lengkap, termasuk pencatatan beban, aset, kewajiban, dan integrasi pembayaran. Namun, pemanfaatan fitur tersebut masih terbatas, terutama pada modul aset dan integrasi lintas sistem seperti SIGTAS dan ASYCUDA. Kondisi ini menunjukkan bahwa kesiapan teknologi berada pada level “siap sebagian”. Pada dimensi organisasi, ditemukan bahwa kapasitas sumber daya manusia merupakan hambatan terbesar dalam implementasi akrual. Pemahaman tentang IPSAS, pencatatan akrual, dan penggunaan modul GRP masih rendah, pelatihan belum berkelanjutan, serta SOP teknis belum distandarisasi. Hal ini berdampak pada rendahnya kualitas pencatatan dan pelaporan akrual, sebagaimana juga tercermin dalam temuan audit nasional. Pada dimensi lingkungan, regulasi akuntansi berbasis akrual di Timor-Leste belum sepenuhnya mapan, dan proses harmonisasi dengan IPSAS masih berlangsung. Selain itu, temuan audit, tuntutan PEFA, dan arahan PFM Reform Strategy menunjukkan bahwa dukungan regulasi dan pengawasan eksternal masih perlu diperkuat untuk mendorong implementasi akrual secara konsisten. Secara keseluruhan, penelitian ini menyimpulkan bahwa kesiapan GRP dalam mendukung implementasi akrual berada pada tingkat moderat, dengan kesiapan teknologi yang cukup, namun menghadapi hambatan

signifikan pada aspek organisasi dan lingkungan. Oleh karena itu, keberhasilan implementasi akrual tidak hanya bergantung pada kapasitas teknis sistem, tetapi juga pada kesiapan sumber daya manusia, standar regulasi yang jelas, serta komitmen kelembagaan dalam memperkuat praktik akuntansi akrual di sektor publik Timor-Leste.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan terima kasih kepada Kementerian Keuangan Timor-Leste, khususnya Direktorat Jenderal Treasury, Direktorat Akuntansi dan Pelaporan, serta Unidade GRP/IFMIS atas kesempatan dan dukungan yang diberikan selama proses pengumpulan data. Penghargaan juga disampaikan kepada seluruh informan dan staf teknis GRP yang telah memberikan wawasan penting terkait implementasi sistem dan kesiapan akuntansi berbasis akrual. Ucapan terima kasih juga ditujukan kepada Universitas Indonesia, khususnya dosen pembimbing Dr. Eliza Fatima, atas bimbingan akademik selama penyusunan penelitian ini. Penulis juga menghargai dukungan dari rekan-rekan akademisi dan mitra kerja yang turut membantu kelancaran penelitian ini. Segala masukan dan bantuan yang diberikan telah memberikan kontribusi besar dalam penyelesaian artikel ini.

REFERENSI

- Asian Development Bank (ADB). (2024). *Financial Management Assessment of Timor* Manila: ADB.
- Banding, P. (2023). *Kamar Auditor Rekening Negara Umum*.
- Dias, B., & Ec, L. (2024). *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Government Financial Statements In Public Institution (Instituisaun Publiku IP) Timor Leste*. 2018, 16–26.
- Financial, P., & Performance, M. (2018). *TIMOR-LESTE Public Expenditure and Financial Accountability (PEFA) Assessment 2018 Public Financial Management Performance Report*.
- Reformasi, S. (2022). *TIMOR LESTE MANAJEMEN KEUANGAN PUBLIK*.
- Sektor, K., Leste, T., Maia, F. D. J., Ximenes, E., Boquifai, P. M., & Ratnawati, T. (2025). *Analisis Penerapan Tata Kelola Keuangan yang Baik*. 5(1998), 862–870. <https://doi.org/10.58471/jms.v5i04>
- Sektor, K., Leste, T., Maia, F. D. J., Ximenes, E., Boquifai, P. M., & Ratnawati, T. (2025). *Analisis Penerapan Tata Kelola Keuangan yang Baik*.
- Yin, R. K. (2023). *research question than a*. 11(1), 2016–2019.